

## ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOMPU

**Amanda Putri Sekardania<sup>1</sup>, Evi Fatmi Utami<sup>2</sup>, En Purmafitriah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa D3 Farmasi, Politeknik Medica Farma Husada Mataram

<sup>2,3</sup>Dosen D3 Farmasi, Politeknik Medica Farma Husada Mataram

amandaputri.ap854@gmail.com

### ABSTRAK

Pengelolaan obat adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan serta pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang proses pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas kesehatan Kabupaten Dompus pada bulan Mei 2017. Data diolah dengan menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum manajemen pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyusunan stok, serta pendistribusian obat, sudah sesuai. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten. Kesimpulannya adalah bahwa Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten sudah sesuai dengan standar.

**Kata kunci : Pengelolaan Obat, Dinas Kesehatan, Kabupaten Dompus**

## PENDAHULUAN

Obat merupakan salah satu komponen penting dan barang yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, obat perlu dikelola dengan baik, efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan obat untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dengan jenis dan jumlah yang cukup, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Oleh karena itu, pengelolaan obat di Kabupaten/Kota memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat untuk pelayanan kesehatan dasar (Anonim, 2008).

Kegiatan pengelolaan obat adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan serta pelaporan. Apabila obat-obatan tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan berbagai kerugian, baik dalam medis maupun ekonomis. Oleh karena itu pengelolaan obat harus dilakukan dengan benar. Salah satu faktor yang mendukung tujuan dari pengelolaan obat adalah penyimpanan (Athijah, 2011).

Pengelolaan obat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah kabupaten/kota. Mulai dari aspek perencanaan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan sistem "*bottom up*", perhitungan rencana kebutuhan obat, serta mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan obat dari beberapa sumber dana. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan melaporkan penggunaan obat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Setiap kabupaten/kota mempunyai struktur dan kebijakan sendiri dalam pengelolaan obat, selanjutnya Pengelola Obat Kabupaten/Kota disebut dengan Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (UPOPPK) Kabupaten/Kota (Anonim, 2008).

Proses pengelolaan obat terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengadaan, tahap penyimpanan, tahap distribusi dan tahap penggunaan. Pengadaan obat adalah salah satu aspek penting dan menentukan dalam pengelolaan obat. Tujuan pengadaan obat adalah tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan (Athijah, 2011).

Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dari pengelolaan obat harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga obat yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran dan tepat guna. Untuk mendukung hal ini, perencanaan obat secara terpadu antara obat untuk pelayanan kesehatan dasar dengan obat program merupakan langkah yang harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan dan pengadaan obat di sektor public. Menurut UU No.32/2004 sebelum otonomi daerah, fungsi pengelolaan obat di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebutuhan obat ditingkat Kabupaten/Kota. Pengadaan obat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan, sedangkan setelah desentralisasi pengadaan obat dilakukan oleh daerah masing-masing yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah adanya beberapa penelitian sebelumnya yang serupa seperti oleh Ingrid N. Rumbae dan kawan-kawan pada tahun 2015 di Universitas Sam Ratulangi Manado tentang Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara, bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan memiliki kesimpulan bahwa perlu mengatur kembali sumber daya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

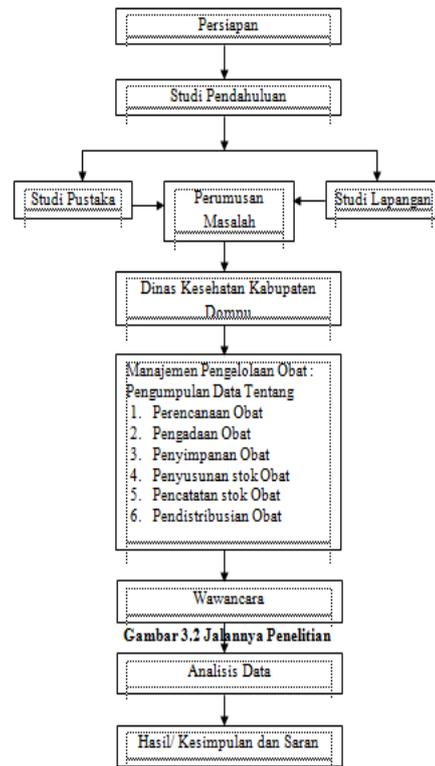
khususnya di bidang pekerjaan kefarmasian, perlu segera dilakukan pelatihan untuk petugas pengelola obat, dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan maksimal khususnya untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan obat serta masih banyak lagi lainnya.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Jamal Abdul Nasir dkk pada tahun 2014 tentang sistem manajemen pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Beberapa penelitian diatas menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan di Dinas Kesehatan di Kabupaten Dompu. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah petugas yang bertanggung jawab dalam mengelola obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## Alur kerja



## Hasil Penelitian

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Perencanaan

Perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dilakukan untuk menentukan jenis obat dan jumlah kebutuhan obat. Kebutuhan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu direncanakan oleh petugas pengelola obat secara berkala setiap periode. Perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu didasarkan pada kebutuhan obat tahun sebelumnya (metode komsumsi) dan berdasarkan pola penyakit, jumlah kunjungan dan waktu tunggu obat (metode epidemiologi).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa data dasar yang digunakan proses perencanaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan

Kabupaten Dompu ialah berdasarkan data pemakaian obat tahun sebelumnya berdasarkan Lembar Pemakaian dan Lembar permintaan Obat (LPLPO) ke IF di Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi rencana kebutuhan obat di dinas ini, kemudian ada teknik-teknik perhitungan yang kami lakukan. Dalam perencanaan kebutuhan obat menyesuaikan dengan atau mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional(DOEN). Dalam kegiatan perencanaan obat ini ada beberapa tahap yang dilakukan antara lain tahap pemilihan obat, tahap pemakaian obat, dan perhitungan kebutuhan obat. Pada tahap perhitungan obat dilakukan dengan metode konsumsi dan mordibitasjuga melihat sisa stok obat yang ada digudang.

Sumber data yang digunakan dinas kesehatan berawal dari data puskesmas yang ada di Kabupaten Dompu yaitu resep obat dari apotek dan kartu persediaan digudang obat di puskesmas, sehingga diperoleh jumlah pemakaian obat tersebut dicatat dalam Laporan Pemakaian dan Laporan Permintaan Obat (LPLPO), selanjutnya data dalam pemakaian obat dalam LPLPO direkapitulasi dalam laporan persediaan akhir tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dinas kesehatan ialah LPLPO yang diambil dari tiap puskesmas di Kabupaten Dompu.

Perencanaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu tidak melibatkan bagian perencanaan, tapi langsung pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan obat di Dinas kesehatan. Setiap Kabupaten/Kota mempunyai

struktur dan kebijakan sendiri dalam pengelolaan obat, sebaiknya pengelola obat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (UPOPPK) Kabupaten/Kota atau gudang farmasi agar pengelolaan obat dapat telaksana dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tupoksi antara gudang farmasi dengan bagian perencanaan dan keuangan.

b. Pengadaan

Pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dilakukan untuk memperoleh jenis dan jumlah obat, obat dengan mutu yang tinggi, menjamin tersedianya obat dengan cepat dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengadaan/permintaan obat harus memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa obat yang diminta/diadakan sesuai dengan jenis dan jumlah obat yang telah direncanakan. Pengadaan obat ditentukan oleh tim pengadaan yaitu ULP (Pelaksana pengadaan). Bahwa pengadaan/permintaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu diajukan oleh penanggungjawab obat dengan memasukkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang sudah di setujui oleh Kepala instalasi farmasi dan diajukan ke kepala Dinas Kesehatan. Pengadaan obat sama halnya dengan perencanaan obat dimana pengadaan juga sama dilakukan oleh tim ULP (Unit Lembaga Pengadaan).

c. Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan.

Untuk penyimpanan sendiri Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mengikuti Standar Operasional Prosedur(SOP) yang ada, yang berdasarkan suhu penyimpanan (Suhu Khusus), yang dimana kegiatan kegiatan didalam penyimpanan ini adalah penataan ruang agar dapat bergerak dalam melakukan aktifitas didalam gudang. Dalam penyimpanan, di dasarkan pada bentuk sediaan obat, alfabets, dan *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO).

d. Penyusunan Stok Obat

Pada penyusunan stok obat disusun menurut prinsip *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO). Dalam penyusunannya, obat yang masa kadaluarsa lebih awal digunakan terlebih dahulu. Penyusunan obat dalam kemasan besar disusun atas pallet secara rapi dan teratur, serta jika obat narkotika digunakan lemari khusus untuk penyimpanannya. Obat juga disimpan pada suhu khusus, obat dengan jenis obat luar dipisahkan penempatannya, nama masing-masing obat kami cantumkan pada masing-masing rak agar mudah dilihat pada saat dibutuhkan. Jika pada obat yang masih banyak ketersediaannya akan tetap disimpan dalam box nya agar tidak mudah rusak atau tercecer.

e. Pencatatan Stok Obat

Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari, Setiap terjadi mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak/kadaluarsa) langsung dicatat di dalam kartu stok, dicatat Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Informasi yang didapat dari pencatatan stok obat antara lain adalah jumlah obat yang tersedia (sisa stok), jumlah obat yang diterima, jumlah obat yang keluar, jumlah obat yang hilang/rusak/kadaluarsa dan jangka waktu kekosongan obat.

f. Pendistribusian Obat

Pada proses pendistribusian obat, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu merencanakan distribusi obat ke puskesmas-puskemas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan puskesmas yang ada. Distribusi obat kepada puskesmas dilakukan atas permintaan penanggung jawab program yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas Induk mendistribusikan kebutuhan obat-obatan untuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada di wilayah binaannya. Obat yang dikirim harus disertai dengan LPLPO. Pada saat pengiriman, sebelum dilakukan pengepakan obat terlebih dahulu dilakukan pengecekan untuk melihat apakah jenis dan jumlah obat, kualitas obat, isi kemasan, no batch, dan kadaluarsa obat baik atau tidak. Setiap obat yang dikeluarkan selalu harus dicatat pada kartu stok dan buku catatan harian pengeluaran obat.

## Pembahasan

### 1. Perencanaan

Perencanaan obat adalah suatu proses kegiatan seleksi obat dan menentukan jumlah obat dan menentukan jumlah obat dalam rangka pengadaan obat. Proses perencanaan kebutuhan obat sangat mempengaruhi ketersediaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, sebab proses perencanaan obat bertujuan untuk mendapatkan jenis dan jumlah obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari terjadinya kekosongan obat. Apabila kebutuhan obat di Dinas Kesehatan tidak direncanakan dengan baik maka akan terjadi kekosongan atau kelebihan obat yang dibutuhkan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan obat dilakukan setiap tahun berdasarkan pemakaian obat tahun sebelumnya (metode konsumsi) atau berdasarkan pola penyakit (metode epidemiologi). Hal ini sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa untuk merencanakan kebutuhan obat yang akan datang dapat digunakan metode konsumsi yaitu berdasarkan data pemakaian obat tahun sebelumnya atau metode epidemiologi yaitu berdasarkan pola penyakit yang disampaikan pihak puskesmas berdasarkan data real di pelayanan masing-masing puskesmas yang berada dibawah lingkup kerja dinas kesehatan. Dengan menggunakan data tersebut obat-obatan yang direncanakan dapat tepat jenis maupun tepat jumlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

### 2. Pengadaan/Permintaan

Pengadaan/Permintaan obat adalah suatu proses pengusulan dalam rangka menyediakan obat dan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayan. Permintaan/pengadaan dimaksudkan agar obat tersedia dengan jenis dan jumlah yang tepat. Pengadaan meliputi kegiatan pengusulan melalui mekanisme Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Permintaan/pengadaan obat merupakan bagian dari tugas distribusi obat oleh Gudang Farmasi sehingga ketersediaan obat di Dinas Kesehatan lebih terjamin. Dalam melakukan distribusi berdasarkan laporan pemakaian dan permintaan obat di semua Puskesmas.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan melaksanakan

pengadaan/pendistribusian obat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengajukan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Hal ini sesuai dengan Pedoman pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan dimana proses pengadaan obat minimal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Penentuan permintaan dengan Laporan Pemakaian dan Permintaan (LPLPO) sangat baik karena mudah dipahami dan dimengerti oleh petugas seperti stok awal, penerimaan persediaan, pemakaian dan sisa stok. Adapun fungsi daftar permintaan tersebut adalah:

- Menghindari gejala penyimpangan pengelolaan obat dari yang seharusnya
  - Optimasi pengelolaan persediaan obat melalui prosedur pengadaan/permintaan yang baik
  - Indikator untuk memilih ketepatan pengelolaan obat
- LPLPO juga memiliki kelemahan diantaranya permintaan obat yang cenderung monoton atau tidak

terdapat alternative pemilihan obat lain.

### 3. Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.

Dari hasil penelitian kegiatan penyimpanan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu meliputi pengaturan tata ruang, penyusunan stok obat, pencatatan stok obat, dan pengamatan mutu obat. Untuk penyimpanan terdapat SOP, yang berdasarkan suhu penyimpanan (Suhu Khusus), bentuk sediaan, alfabets, dan *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO).

### 4. Penyusunan Stok Obat

Dari hasil wawancara, dalam penyusunannya, obat yang masa kadaluarsa lebih awal digunakan lebih awal. Menyusun dalam kemasan besar di atas pallet secara rapi dan teratur, serta obat narkotika gunakan lemari khusus untuk penyimpanannya. Obat juga disimpan pada suhu khusus, obat dengan jenis obat luar di pisahkan penempatannya, namamasing-masing obat di cantumkan pada masing-masing rak agar mudah di lihat pada saat dibutuhkan. Jika pada obat masih banyak ketersediaannya maka akan tetap menyimpannya dalam boxnya agar tidak mudah rusak atau tercecer. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa untuk penyusunan obat yang menggunakan prinsip FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*) dalam penyusunan obat yaitu obat yang masa kadaluarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal sebab umumnya obat yang

datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umurnya relative lebih tua dan masa kadaluarsanya mungkin lebih awal. Obat disusun dalam kemasan besar di atas pallet secara rapi dan teratur. Pada obat narkotika menggunakan lemari khusus untuk menyimpannya.

### 5. Pencatatan Stok Obat

Dari hasil wawancara, pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari, Setiap terjadi mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak/kadaluarsa) langsung dicatat di dalam kartu stok, dicatat Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Informasi yang didapat dari pencatatan stok obat antara lain adalah jumlah obat yang tersedia (sisa stok), jumlah obat yang diterima, jumlah obat yang keluar, jumlah obat yang hilang/rusak/kadaluarsa dan jangka waktu kekosongan obat. Petunjuk pengisian stok obat adalah petugas penyimpanan dan penyaluran mencatat segala penerimaan dan pengeluaran obat di Kartu Stok sesuai dengan apa yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB), Dokumen Bukti Mutasi Barang (DBMB) atau dokumen lain yang sejenis. Obat disusun menurut ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Obat dalam jumlah besar (bulk) disimpan diatas pallet atau ganjal kayu secara rapi, teratur dengan memperhatikan tanda-tanda khusus (tidak boleh terbalik, berat, bulat, segi empat dan lain-lain)
- b. Penyimpanan antara kelompok/jenis satu dengan yang lain harus jelas sehingga memudahkan pengeluaran dan perhitungan

- c. Penyimpanan bersusun dapat dilaksanakan dengan adanya forklift untuk obat-obat berat
- d. Obat-obat dalam jumlah kecil dan mahal harganya disimpan dalam lemari terkunci dipegang oleh petugas penyimpanan dan pendistribusian
- e. Satu jenis obat disimpan dalam satu lokasi (rak, lemari dan lain-lain)
- f. Obat dan alat kesehatan yang mempunyai sifat khusus disimpan dalam tempat khusus. Contoh : Eter, film dan lain-lain

Obat-obat disimpan menurut sistem FEFO dan FIFO, Kartu stok memuat nama obat, satuan, asal (sumber) dan diletakkan bersama obat pada lokasi penyimpanan dan diparaf oleh petugas yang mengerjakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan kartu stok sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pencatatan stok obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dibedakan berdasarkan anggaran dana yang didapat, dari hasil penelitian tersebut bahwa kartu stok obat yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu terdapat tiga warna kartu stok yang berbeda untuk kartu stok yang berwarna hijau dan ungu sumber anggaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kartu stok yang berwarna kuning sumber anggaran dananya dari Dana Alokasi khusus (DAK), dan pada kartu stok yang berwarna pink dana anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

#### 6. Pendistribusian Obat

Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahannya serta tepat jenis dan jumlahnya dari gudang obat di unit-

unit pelayanan kesehatan termasuk penyerahan obat kepada pasien.

Distribusi obat bertujuan untuk mendekatkan obat dan alat kesehatan kepada pemakai di unit pelayanan kesehatan sehingga setiap saat tersedia dalam jumlah, jenis, mutu yang di butuhkan secara ekonomis dan efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada proses pendistribusian obat, adalah merencanakan distribusi obat ke puskesmas-puskemas yang ada di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten sesuai dengan kebutuhan puskesmas yang ada. Distribusi obat kepada puskesmas dilakukan atas permintaan penanggung jawab program yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas Induk mendistribusikan kebutuhan obat-obatan untuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada di wilayah binaannya. Obat yang dikirim oleh harus disertai dengan LPLPO. Pada saat pengiriman, sebelum obat dikepak dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk melihat apakah jenis dan jumlah obat, kualitas obat, isi kemasan, no batch, dan kadaluarsa obat baik atau tidak. setiap obat yang dikeluarkan selalu harus dicatat pada kartu stok dan buku catatan harian pengeluaran obat. hal ini sesuai dengan pedoman dinas kesehatan bahwa Instalasi farmasi di Kabupaten melaksanakan distribusi obat ke Puskesmas di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan. Puskesmas Induk mendistribusikan kebutuhan obat-obatan untuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada di wilayah binaannya. Distribusi obat-obatan dapat pula dilaksanakan langsung dari

instalasi farmasi ke Puskesmas Pembantu sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara umum manajemen pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyusunan stok, serta pendistribusian obat, sudah sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya perencanaan kebutuhan setiap tahunnya berdasarkan metode-metode yang ada dalam Pedoman Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten. Dilaksanakannya pengadaan/permintaan obat, seta penyimpanan, penyusunan obat yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan pendistribusian obat-obatan dari gudang obat Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dilakukan dengan sistem distribusi secara rutin setiap bulannya dan distribusi secara khusus. Distribusi obat ke Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) dilakukan dengan cara dikirim oleh instalasi farmasi kota atau diambil oleh UPK. Obat-obat yang akan dikirim ke Puskesmas harus disertai dengan Laporan Pemakaian dan Laporan Permintaan Obat (LPLPO) dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) serta diperiksa kembali kelengkapannya dan kesesuaian obat-obat yang akan dikirim sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim.2007. Farmakologi dan Terapi.edisi 5, Departemen Farmakologi. Terapeutik, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga.
- Anonimous.2008. *Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbakalan kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar*.Lampiran.Ditjen Yanfar dan Alkes Jakarta.
- Anonimous. 2014. Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Depkes RI. Jakarta
- Ansel, H.C.,1985. Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. Diterjemahkan oleh Farida Ibrahim, Edisi IV.UI-Press, Jakarta AOAC.
- Athijah, U ., P ristanty, L . d an P uspitasari, H .P., 2011.*Buku Ajar. Preskripsi: Obat dan Resep*, Surabaya: A irlangga. University Press, hal.
- Cunselo, 1997.*Analisis Perhitungan Data*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Maimun, Ali. 2008. *Perencanaan Obat Antibiotik Berdasarkan Kombinasi Metode Konsumsi Dengan Analisis Abc*(Tesis), Pasca Sarjana Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Notoatmodjo, S, 2002. *Metode Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Quick, J.D.,et al., 1997, *Managing Drug Supply, The Selection, Procurement,*
- Seto, S., Nita, Y., Triana, L., 2004, *Manajemen Farmasi*, 297-298, Airlangga. University Press, Surabaya
- Suryabrata.(2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta.
- Susi, S. Dan A. Wiku. 2006. *Analisis Perencanaan Obat Berdasarkan ABC*.

Syair. 2008. Manajemen Farmasi.  
Airlangga University Press.  
Surabaya.

Syamsuni, 2005, *Farmasetika Dasar dan  
Hitungan Farmasi*, Penerbit Buku.  
Kedokteran EGC